

LAPORAN KINERJA 2025

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP) Triwulan 1 Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat capaian kinerja, sasaran strategis, serta indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Setditjen PDSPKP dalam menjalankan perannya sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelayanan teknis dan administratif.

Setditjen PDSPKP sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, berharap agar laporan ini dapat memenuhi harapan stakeholders sebagai media pertanggungjawaban dan pemacu peningkatan kinerja organisasi Setditjen PDSPKP. Secara garis besar pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP tahun 2025 Triwulan 1 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP sebesar 107.50% (Kategori Baik).

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat serta capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berlandaskan semangat internalisasi nilai-nilai #KITAPDS Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Jakarta, 15 April 2025
Sesditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSKLUSIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 Sekretariat Ditjen PDSPKP memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan.

Sebanyak 20 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan 1 Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar 107.50% (Kategori Baik).

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang bersifat triwulanan seluruhnya telah diukur capaiannya dengan rincian 3 (tiga) IKK capaiannya diatas 100% yaitu: (1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP; (2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP;
3. 15 (lima belas) indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (5) Nilai

Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (9) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (10) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 Serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (11) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (13) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (14) Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditektorat jenderal PDSPKP, (15) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 89.082.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp 19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp 70.025.925.000,- (Tujuh puluh miliar dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 21.872.044.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah) setara dengan 24,55% terhadap pagu awal dan sebesar 31,23% dari pagu anggaran efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIVE	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Sistematika Penyajian LKj	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	12
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	12
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK- RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	14
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	16
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	18
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	20

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	26
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	30
8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	34
9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks).....	38
10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	40
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	43
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	46
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	48
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai).....	50
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	53
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	55
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	57
18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	60
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	63
20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen).....	66

C. Realisasi Anggaran.....	70
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	71
C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.....	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	7
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025	10
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	13
Tabel 4.	Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025	14
Tabel 5.	Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	14
Tabel 6.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	16
Tabel 7.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	18
Tabel 8.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.....	21
Tabel 9.	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	26
Tabel 10.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	30
Tabel 11.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP.....	35
Tabel 12.	Tindak Lanjut Hasil Reviu Manajemen Risiko	36
Tabel 13.	Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	39
Tabel 14.	Ikhtisar pencapaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	41
Tabel 15.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	44
Tabel 16.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	47

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	48
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	51
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	53
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	55
Tabel 21. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	57
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	61
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	64
Tabel 24. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan	65
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP	66
Tabel 26. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan 1 Tahun 2025	4
Gambar 2.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024	5
Gambar 3.	Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	9
Gambar 4.	Penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II TA 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP	15
Gambar 5.	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024	18
Gambar 6.	Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP	22
Gambar 7.	Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP	22
Gambar 8.	Rapat Penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDSPKP	23
Gambar 9.	Kegiatan Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas	24
Gambar 10.	Kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal	25
Gambar 11.	Monitoring capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output Tw IV Tahun 2024	27
Gambar 12.	Pemutakhiran data RPD pada Tw I Tahun 2025	28
Gambar 13.	Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA pada Indikator Halaman III DIPA Tahun 2025 di KKP	29
Gambar 14.	Rapat Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Kegiatan Tahun 2025	31
Gambar 15.	Rapat dalam rangka Pembahasan Matriks Usulan Buka Blokir dan Data Dukung Usulan Revisi	32
Gambar 16.	Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025	33
Gambar 17.	Rapat Pembahasan Matrik Usulan Revisi Efisiensi Anggaran Pasca Penetapan Pagu Efisiensi per Eselon I	33
Gambar 18.	Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi	34
Gambar 19.	Koordinasi Persiapan Pengadaan PJLP di lingkungan PDSPKP	40
Gambar 20.	Pemusnahan non arsip lingkup Ditjen PDSPKP	45

Gambar 21. Sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	45
Gambar 22. Verifikasi Penyerahan Arsip Statis Sistem Logistik Ikan Nasional	45
Gambar 23. Penilaian usul musnah arsip di lingkungan Ditjen PDSPKP	46
Gambar 24. Dashboard Kinerja Kearsipan.....	46
Gambar 25. Rapat finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP	48
Gambar 26. Rapat pembahasan IKU terkait Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP	52
Gambar 27. Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran	54
Gambar 28. Pemeliharaan BMN	56
Gambar 29. Rapat Pembahasan Pemanfaatan BMN Cold Storage Muara Baru bersama KPKNL Jkt II, Pengguna Barang KKP dan BBP3KP	69
Gambar 30. Rapat Pembahasan Piutang PT Perindo atas Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru Bersama Biro Keuangan dan Inspektorat IV KKP	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2024 73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP tidak hanya berfungsi sebagai penopang administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Salah satunya mendukung kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan market driven di mana kebutuhan dan preferensi pasar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sehingga lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, produk kelautan dan perikanan dituntut memiliki karakteristik unggul, yakni berkualitas tinggi (high quality), aman untuk dikonsumsi (safe), dapat ditelusuri asal-usulnya (traceable), memiliki nilai tambah yang tinggi (high value content), serta kompetitif di pasar (competitive). Pelaksanaan kebijakan ini dirancang secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan itu, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat

dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak pemberi mandat. Melalui laporan ini, dirumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

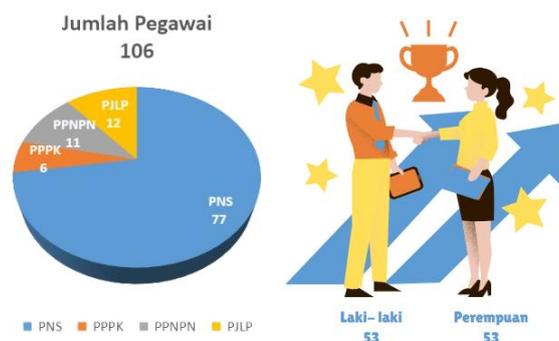
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 1133/SJ.3/OT.210/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
3. Tim Kerja Hukum;
4. Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
5. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
6. Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal;
7. Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Tim Kerja Kearsipan dan layanan Perkantoran.

D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan 1 Tahun 2025

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025-2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

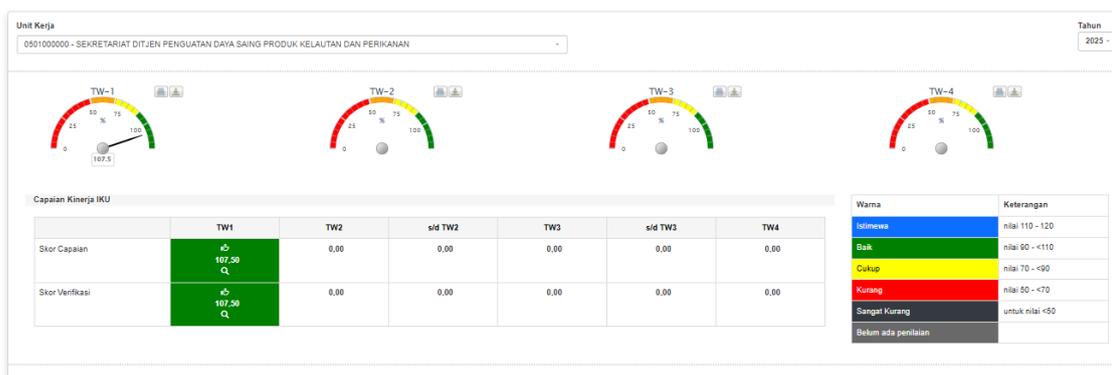
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 107,50%. NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan 1 Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2025	% Terhadap Target TW I	% Terhadap Target 2025
		Tahun 2025	TW I 2025			
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85	85	100	117,65	117,65
	2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5	-	-	-	-
	3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81	-	-	-	-
	4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76	-	-	-	-
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92	-	-	-	-
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5	-	-	-	-
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5	-	-	-	-
	9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2025	% Terhadap Target TW I	% Terhadap Target 2025
		Tahun 2025	TW I 2025			
	10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	-	-	-	-
	11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80	-	-	-	-
	12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76	-	-	-	-
	13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65	-	-	-	-
	14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77	-	-	-	-
	15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90	-	-	-	-
	16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12	3	3	100	25
	17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100	-	-	-	-
	18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi TW I 2025	% Terhadap Target TW I	% Terhadap Target 2025
			Tahun 2025	TW I 2025			
	19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	0	120	120
	20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada LHP-nya pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	85	80	80	85	100	96,15	100	85	117,65	100	4,00	0

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 117,65% terhadap target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap target Tahun 2025, yang masing-masing ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW IV 2024) yang juga sebesar 100%, maka capaian triwulan I tahun 2025 tidak mengalami pertumbuhan. Namun jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW I 2024) sebesar 96,15%, maka terdapat kenaikan capaian sebesar 4%.

Pada triwulan I Tahun 2025 Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 19 Maret 2025. Rapat dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP terkait. Pada kegiatan ini dibahas terkait laporan hasil pemeriksaan Itjen beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode triwulan I

Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100% (tuntas 102 dari 102 rekomendasi).

Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Direktorat Logistik	16	16	100%	0	0%
2	Direktorat Pengolahan	15	15	100%	0	0%
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	5	5	100%	0	0%
4	Direktorat Pemasaran	5	5	100%	0	0%
5	Setditjen PDSPKP	50	50	100%	0	0%
6	BBP3KP	11	11	100%	0	0%
TOTAL		102	102	100%	0	0%

2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan <0,5. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator

kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
- b. kegiatan penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 14 s.d 17 Januari 2025. *Output* kegiatan ini yaitu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Eselon 1 Semester I Tahun 2024 (*Unaudited*) serta Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Satker dan UPT Semester I Tahun 2024 (*Unaudited*);



Gambar 4. Penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II TA 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP

- c. melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 428.612.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp524.100.000,- atau setara dengan 82%.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP ditargetkan 81%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 80%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah tahun 2024 serta kompilasi laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal:

- a. Pelaporan mengenai penyaluran bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan KKP. Dengan adanya acuan regulasi ini, diharapkan mekanisme penyaluran bantuan semakin jelas, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- b. Pelaporan penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara digital melalui matrik online yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/BAST-BPPDS-2024>.
- c. Dengan sistem pelaporan berbasis digital ini, diharapkan transparansi dan akurasi dalam penyampaian laporan dapat ditingkatkan, serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi program oleh Ditjen PDSPKP.
- d. Pelaporan bantuan pemerintah dilakukan melalui matrik <https://bit.ly/BAST-BPPDS-2024>.
- e. Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP menyalurkan delapan jenis bantuan pemerintah, yang meliputi:
 - Chest Freezer – Digunakan untuk penyimpanan produk perikanan dalam kondisi beku agar tetap terjaga kualitasnya.
 - Peralatan Pengolahan – Berupa mesin dan alat yang mendukung proses pengolahan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah.
 - Gudang Beku Portable – Penyimpanan berskala besar yang dapat dipindahkan untuk mendukung industri perikanan.
 - Sarana Pasca Panen – Berbagai fasilitas yang digunakan untuk menjaga kualitas hasil perikanan setelah proses penangkapan atau budidaya.
 - Cool Box – Kotak penyimpanan berpendingin untuk menjaga kesegaran ikan selama distribusi.

- Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah – Fasilitas untuk mengolah hasil perikanan agar lebih bernilai di pasar.
- Pabrik Es Portable – Mesin pembuat es yang dapat dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan es dalam industri perikanan.
- Kendaraan Berefrigerasi – Kendaraan dengan sistem pendingin yang digunakan untuk mendistribusikan hasil perikanan dalam kondisi segar atau beku.



Gambar 5. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024

4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pembangunan Integritas Lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- b. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 7 Tahun 2025;
- c. Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 8 Tahun 2025;
- d. Menghadiri rapat pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas KKP Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 februari 2025;
- e. Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- f. *Public Campaign* Pengendalian Gratifikasi melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal PDSPKP Nomor B.914/DJPDSPKP/HK.170/III/2025 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- g. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2025;

- h. Seluruh pegawai Ditjen PDSPKP telah melakukan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik melalui LHKPN maupun SPT Pajak secara tepat waktu.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 2.998.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp259.109.000,- atau setara dengan 1%.

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		86	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 86. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 84.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024 pada tanggal 6 Januari 2025.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024, sesuai dengan surat undangan nomor B.55/DJPDSPKP.1/TU.330/I/2025 tanggal 2 Januari 2025. Agenda Acara pada kegiatan adalah Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 2. Periode Triwulan IV tahun 2024; Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan perkiraan biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi ditandatangani oleh pimpinan level I, level II, dan level III, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani. Rencana aksi dapat direvisi sesuai hasil evaluasi yang dilakukan setiap triwulan.



Gambar 6. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2024 pada tanggal 8 Januari 2025.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2024 sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan surat undangan B.57/DJPDSPKP.1/TU.330/I/2025 tanggal 2 Januari 2025

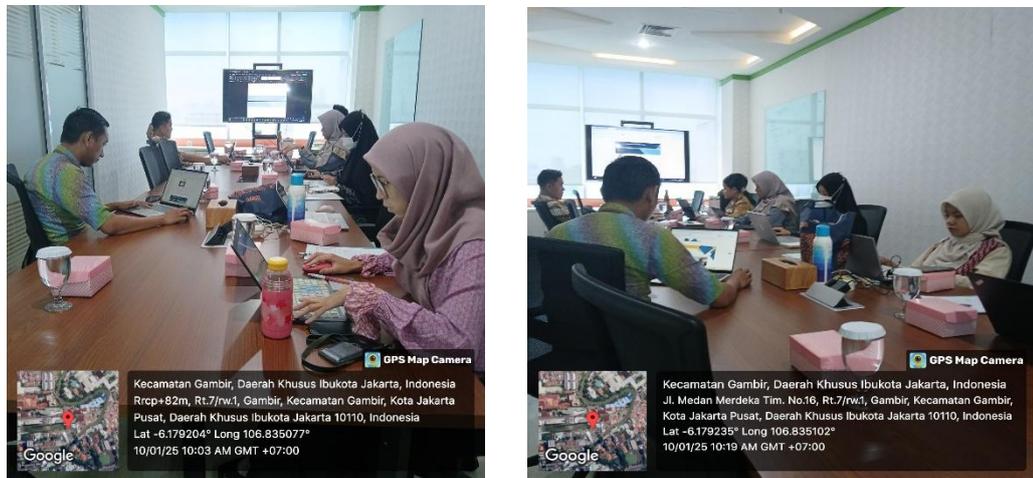


Gambar 7. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP

- c. Rapat Penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV tahun 2024 pada 10 Januari 2025.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan LKj Level 1 lingkup Ditjen PDSPKP Periode triwulan IV tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;



Gambar 8. Rapat Penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDPSKP

d. Rapat Verifikasi Capaian Kinerja Level 2 Lingkup Ditjen PDSPKP Periode TW IV Tahun 2024 pada 17 Januari 2025

Tujuan kegiatan verifikasi kinerja adalah untuk memvalidasi setiap capaian kinerja agar dilengkapi dengan data yang memadai, Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Ditjen PDSPKP memiliki enam unit kerja Eselon II yaitu Sekretariat Ditjen PDSPKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Logistik, dan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan; Setiap capaian kinerja yang dianggap tidak valid memiliki konsekuensi yaitu:

1. Pengurangan 1% (satu persen) nilai kinerja organisasi per indikator kinerja, jika data dukung tidak sesuai dengan capaian kinerja; atau
2. Perubahan data realisasi indikator kinerja menjadi 0 (nol) per indikator kinerja, jika tidak ada data dukung

e. Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas pada 21 Januari 2025

Area Pemantauan pada aplikasi Emonev PP39 Bappenas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Kelengkapan Data Pelaporan, memastikan agar pelaporan 100% pada realisasi komponen, realisasi output renja, realisasi indikator kegiatan dan realisasi output program;
- 2) Pemantauan kualitas data pelaporan yang terdiri dari pemantauan pada realisasi fisik dan anggaran.

Capaian kinerja dan anggaran periode triwulan IV tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP yang telah dilaporkan pada aplikasi Emonev PP39 Bappenas dengan tingkat kepatuhan pelaporan sebesar 100% baik pada akun K4 unit kerja Eselon I, akun K5 unit kerja Eselon II dan UPT, serta Akun K8 Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Provinsi lingkup Ditjen PDSPKP



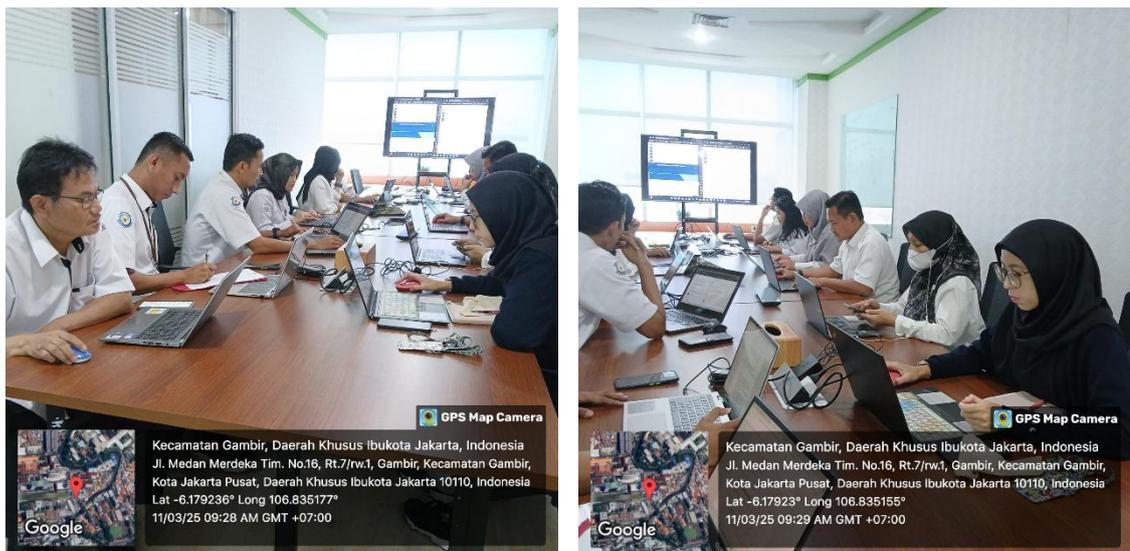
Gambar 9. Kegiatan Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas

- f. Rapat Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 sesuai dengan surat Setditjen PDSPKP nomor B.2880/DJPDSPKP.1/TU.330/III/2025 tanggal 06 Maret 2025. Menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor T.72/ITJ/HP.330/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal Hasil Reviu Laporan Kinerja Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2024, maka perlu dilakukan tindak lanjut hasil rekomendasi rewiu tersebut.

Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data/Informasi Kinerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP telah ditetapkan dan diamanatkan kepada Koordinator Kelompok Kerja Program sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 57 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP; Laporan Kinerja IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sesuai, yaitu pada Kelompok Kerja Program melalui penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP berdasarkan Kepmen KP Nomor 8/SJ Tahun 2024, tanggal 7 Februari 2024 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP Tahun 2024;



Gambar 10. Kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.330.540.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp223.002.000,- atau setara dengan 21%.

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		92	-	-	-	-	-	-	-	-

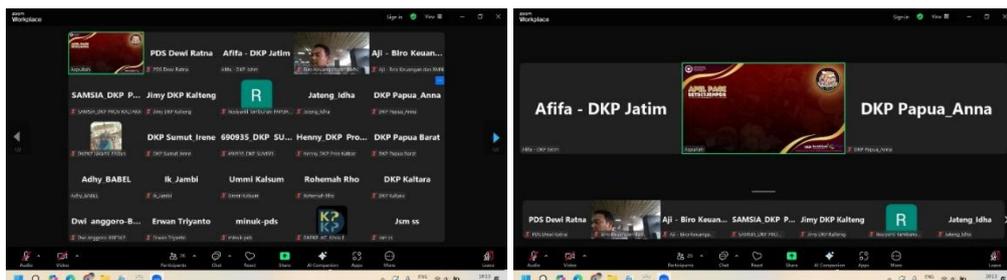
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 92. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya.

Dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Jenderal PDSPKP pada perioder Triwulan I tahun 2025, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan monitoring capaian IKPA pada pengisian Capaian Output periode Triwulan IV tahun 2024 dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Januari 2025,

kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 38 Satker TP. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan data pada aplikasi SAKTI capaian output per tanggal 7 Januari 2025 sebesar 46,04% dari target capaian sebesar 100%. satker yang sudah melakukan kirim capaian output sebanyak 37 Satker dengan status RO tidak valid sebanyak 6 satker, capaian tidak maksimal (capaian kurang dari 100%) sebanyak 11 satker dan belum kirim data sebanyak 3 satker TP.
- Dalam pelaksanaan kegiatan, masih terdapat beberapa kendala terkait pemahaman cara menghitung capaian output akhir periode 2024 dan teknis pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan disampaikan kembali kepada seluruh Satker TP terkait cara menghitung persentase capaian secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 dan memberikan bimbingan teknis pengisian capaian output melalui aplikasi SAKTI.
- Output dari pelaksanaan kegiatan yaitu, sebanyak 39 Satker (Pusat, UPT dan TP) sudah melakukan pengisian data capaian output periode Juni dengan nilai capaian sebesar 82,0%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 1 Satker TP belum melakukan pengisian capaian output dan terdapat 4 Sakter TP dengan nilai Capaian Ouput tidak maksimal atau tidak mencapai 100%.

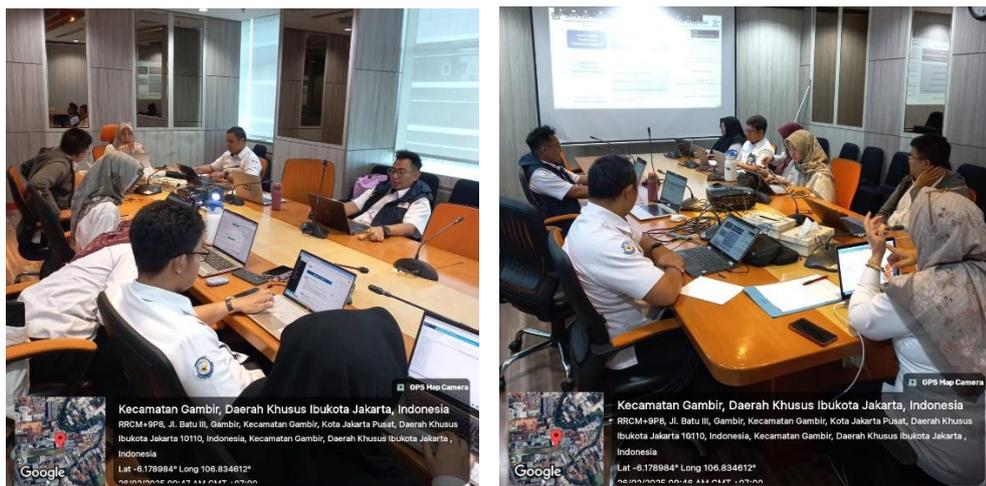


Gambar 11. Monitoring capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output Tw IV Tahun 2024

- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2025 berdasarkan pada akun 51, 52 dan 53 pada Satker Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan, guna

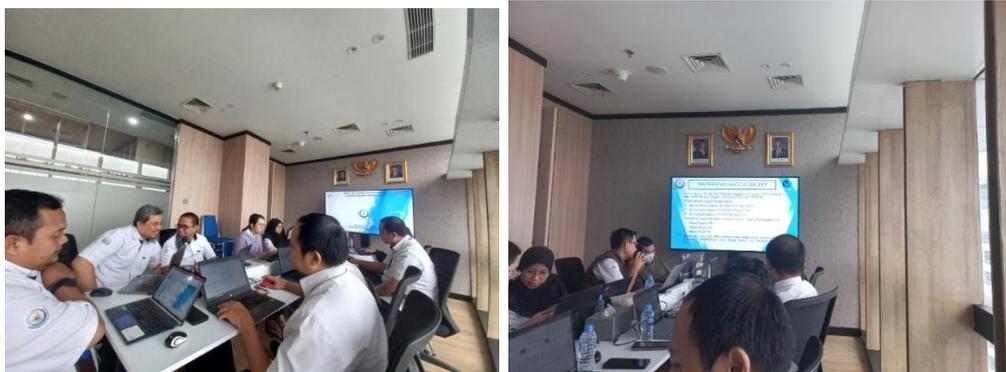
menghindari terjadinya deviasi pada Halaman III DIPA tidak melebihi (kurang/lebih) sebesar 5 % (lima persen).

- Pemutakhiran data RPD pada triwulan I Tahun 2025 sebagai satu langkah DJPDSPKP dalam menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyesuaian Data dan Penghitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I tahun 2025, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
- Pemutakhiran data Target RPD tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PDSPKP menyesuaikan dengan pagu anggaran TA 2025 pasca efisiensi anggaran, yaitu menyesuaikan dengan pagu anggaran aktif dan pagu blokir anggaran khususnya pada akun 52 dan 53.
- Untuk memperoleh nilai maksimal 100% pada halaman III DIPA dengan nilai ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5% (lima persen). Ditjen PDSPKP akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran secara berkala pada bulan berjalan dengan melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan penggunaan anggaran belanja.



Gambar 12. Pemutakhiran data RPD pada Tw I Tahun 2025

- c. Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA pada Indikator Halaman III DIPA Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 24 Februari 2025. Adapun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:
- Capaian nilai IKPA KKP pada tahun 2024 sebesar 93,84% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 93,76%, Adapun aspek penghitungan capaian IKPA sebagai berikut:
 - Capaian atas Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,03%.
 - Capaian atas Aspek Kualitas Pelaksanan Anggaran sebesar 96,08%.
 - Capaian Aspek Kaulitas Hasil Pelaksanaan Anggaran atas Indikator Capaian Output Satker lingkup KKP sebesar 97,66%.
 - Dispensasi SPM (Pengurang) sebesar 0,50%.
 - Berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran S-44/PB.2/2025 Tanggal 5 Februari 2025 tentang Ketentuan Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I 2025 serta Pelaporan Target dan Capaian Output 2025, disampaikan bahwa batas waktu pemutakhiran RPD bulanan periode triwulan I 2025 yang semula jatuh pada tanggal 14 Februari 2025, diperpanjang sampai tanggal 28 Februari 2025, dan batas waktu pelaporan capaian output akan diinformasikan lebih lanjut.



Gambar 13. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA pada Indikator Halaman III DIPA Tahun 2025 di KKP

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		81,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 81,5. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 71.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode Triwulan I guna pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP sekaligus sebagai lanjut dari periode triwulan sebelumnya antara lain:

1. Rapat Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Kegiatan Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2025.

Selama tahun 2024, Ditjen PDSPKP mencatatkan capaian signifikan dalam pengelolaan keuangan yang transparan. Berdasarkan data OM-SPAN hingga 31 Desember 2024, saldo kas bendahara pengeluaran di seluruh 40 satker telah mencapai nol, mencerminkan efisiensi pengelolaan dana operasional. Proses pengajuan uang persediaan (UP) untuk tahun 2025 ditargetkan selesai pada 6 Januari 2025, dengan dukungan penuh dari tim keuangan internal. Untuk mengejar target 100%, Ditjen PDSPKP akan mengintensifkan koordinasi daring bersama Inspektorat IV dan satker tugas pembantuan melalui platform Zoom. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh dokumentasi sesuai standar audit yang ditetapkan.



Gambar 14. Rapat Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Kegiatan Tahun 2025

2. Rapat dalam rangka Pembahasan Matriks Usulan Buka Blokir dan Data Dukung Usulan Revisi, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025.

Pagu Anggaran Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp255.259.620.000 (dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah anggaran yang terblokir sebesar Rp82.824.827.000. Ada 2 jenis blokir yang ada pada dokumen DIPA Ditjen PDSPKP yaitu blokir kode 2 (diblokir karena belum dilengkapi dokumen yang diperlukan) sebesar Rp63.792.711.000 dan blokir kode A (Arahan Presiden dalam sidang kabinet) sebesar Rp19.032.116.000.

Setiap unit Eselon II diharapkan dapat menyiapkan data dukung yang diperlukan dalam rencana buka blokir tersebut, sambil menunggu tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Gambar 15. Rapat dalam rangka Pembahasan Matriks Usulan Buka Blokir dan Data Dukung Usulan Revisi

3. Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal di atas yang merujuk kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, maka setiap Unit Kerja Eselon I lingkungan KKP untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran tahun 2025.



Gambar 16. Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025

4. Rapat Pembahasan Matrik Usulan Revisi Efisiensi Anggaran Pasca Penetapan Pagu Efisiensi per Eselon I, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025.

Efisiensi anggaran belanja KKP sebesar Rp2.120.355.524.000 akan disampaikan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 13 Februari 2025. Efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dilakukan terhadap Belanja Barang (Akun 52) dan Belanja Modal (Akun 53). Total Efisiensi Anggaran Ditjen PDSPKP TA 2025 sebesar Rp103.972.345.000 dengan rincian Belanja Barang (52) sebesar Rp98.587.615.000 dan Belanja Modal (53) sebesar Rp5.384.730.000.



Gambar 17. Rapat Pembahasan Matrik Usulan Revisi Efisiensi Anggaran Pasca Penetapan Pagu Efisiensi per Eselon I

5. Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025

Efisiensi anggaran yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap pagu anggaran Ditjen PDSPKP yang berdampak pada penurunan volume pencapaian output yang akan dilaksanakan.



Gambar 18. Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi

6. Rapat Pembahasan Pembahasan Revisi Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025.

Rincian informasi revisi: (a) Mekanisme Revisi: Revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. (b) Tata Cara Revisi: Revisi pergeseran anggaran antar akun pada Rincian Output yang sama. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran : Mempercepat pencapaian kinerja kementerian/Lembaga, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		3,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 3,5. Penghitungan pencapaian

indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 3,3.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,5 Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada Triwulan I tahun 2025. Setditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan pembahasan penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 15 Januari 2025. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan update atas realisasi pengendalian pada form pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan IV 2024.

Selain itu dilaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil reviu manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal dengan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 12. Tindak Lanjut Hasil Reviu Manajemen Risiko

No.	Rekomendasi Itjen	Tindak Lanjut
1.	menyusun Penilaian Risiko Level I pada 4 (empat) Indikator Sasaran Program	<ul style="list-style-type: none"> - MR Indikator Sasaran Program 1.1. Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar); - Penilaian Risiko Level I Indikator Sasaran Program 1.2. Nilai Ekspor Komoditas Perikanan Lainnya (USD Miliar); - Penilaian Risiko Level I Indikator Sasaran Program 1.3. Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri (Rp Triliun); - Penilaian Risiko Level I Indikator Sasaran Program 1.4. Prosentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)

No.	Rekomendasi Itjen	Tindak Lanjut
2.	mengusulkan Form Penetapan Konteks, dan Form Pembobotan Risiko Kegiatan Level I, serta Selera Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Memo Seditjen PDSPKP kepada Direktur Jenderal PDSPKP Nomor: 2296/DJPDSPKP.1/TU.210/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Draft Form Penetapan Konteks dan Form Pembobotan Risiko Kegiatan Level I Tahun 2025; - Form Pembobotan Risiko Kegiatan Level I; dan - Form Penetapan Konteks
3.	menetapkan Penilaian Risiko Level II	Penilaian Risiko Level II yang telah ditetapkan oleh Direktur dan Kepala Balai Besar

b. menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan SPIP Terintegrasi (SILASTRI) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Februari 2025 melalui media *zoom meeting* yang diikuti oleh tim satuan tugas SPIP Ditjen PDSPKP. Pada sosialisasi ini disampaikan beberapa hal:

- 1) Maksud dibuatkannya sistem pelaporan SPIP berkala terintegrasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk memberikan informasi bagi seluruh pimpinan dalam pengambilan keputusan serta seluruh pegawai tentang penyelenggaraan SPIP setiap bulannya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara cepat sehingga hal-hal yang dapat menghambat tujuan organisasi bahkan kerugian yang lebih besar dapat dilakukan pencegahan dan penanganan lebih dini.
- 2) Tujuan sistem pelaporan SPIP berkala terintegrasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan SPIP melalui sistem yang terintegrasi, mempercepat proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis data SPIP, meningkatkan akurasi dan konsistensi data pelaporan SPIP, memudahkan monitoring dan evaluasi implementasi SPIP di setiap unit organisasi.
- 3) Tahapan Pembuatan Sistem Informasi Pelaporan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi alur kerja pelaporan mulai dari tingkat Satker
- Membuat pertanyaan pada googleform dimulai dari Bulan Pelaporan dan Profil Satker
- Selanjutnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian
- Setelah Satker melakukan pengiriman googleform, data kemudian masuk ke googlesheet, kemudian berdasarkan format GoogleDoc sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian googlesheet dilakukan olah data melalui aplikasi Autocrat
- Setelah proses autocrat berhasil, kemudian secara otomatis satker dapat menerima hasil laporannya melalui email atau link download yang disediakan oleh Biro Keuangan dan BMN selaku Satgas SPIP Kementerian.
- Setelah proses selesai, Satgas SPIP Eselon I melakukan monitoring atas satker-satker yang telah melakukan pelaporan
- Setelah semua tahapan dilaksanakan, selanjutnya pembuatan Google site sebagai dashboard terintegrasi

9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau

- SK Pencantuman Gelar yang di update pada aplikasi SIASN BKN dan E-Pegawai KKP;
- 2) Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi MyASN BKN dan E-Pegawai KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional;
 - 3) Kinerja dengan bobot 30% berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai BKN pada aplikasi E-Pegawai KKP, dan
 - 4) Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi E-Pegawai KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	-	-		87	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 87. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 87.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 57.639.240,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) sampai dengan Bulan Desember 2025.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PDSPKP antara lain:

- a. Koordinasi Persiapan Pengadaan PJLP di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025.



Gambar 19. Koordinasi Persiapan Pengadaan PJLP di lingkungan PDSPKP

- b. Verifikasi dan Supervisi Berkas pada Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK KKP T.A. 2024 Tahap II pada tanggal 7 Januari 2025.
- c. Pembahasan Penyelarasan Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 Januari 2025.
- d. Sosialisasi Pemberkasan dan Usul NIP CPNS KKP Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 24 Januari 2025.
- e. Rapat Perumusan Penyelarasan Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Februari 2025;
- f. Pelantikan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil a.n Ratu Mila Susilawati, A.Md.Ak tanggal 11 Maret 2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp800.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp17.665.000,- atau setara dengan 2%.

10. **Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan

Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, peraturan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2025 meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 14. Ikhtisar pencapaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan ditargetkan untuk selesai pada bulan Juli tahun 2025, sedangkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan ditargetkan untuk selesai (mengirimkan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum) pada bulan Agustus tahun 2025. Capaian indikator kinerja pada Triwulan I belum dapat diperhitungkan, hal ini karena rancangan peraturan menteri dimaksud belum diselesaikan, dengan harapan penyelesaian tetap sesuai perencanaan atau lebih cepat.

Selain penyusunan peraturan menteri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada triwulan I telah dilakukan beberapa kali pembahasan baik lingkup internal Ditjen PDSPKP maupun antar eselon I lingkup KKP sebagai berikut:

- a. Pembahasan Rencana Aksi GEMARIKAN, tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan undangan no B.403/DJPDSPKP.1/HK.150/I/2025
- b. Tindak lanjut pembahasan Rperpres GEMARIKAN, tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan undangan no B.1373/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025
- c. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan undangan nomor B.1374/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025

- d. Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) lanjutan substansi Ditjen PDSPKP, tanggal 13 Februari berdasarkan undangan no B.1959/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025
- e. Pembahasan GEMARIKAN, tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan undangan no B.3058/DJPDSPKP.1/TU.330/III/2025
- f. Pembahasan Sinkronisasi Rencana Aksi GEMARIKAN, tanggal 13 April 2024 berdasarkan undangan Nomor B.3802/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp21.486.000,- atau setara dengan 2%.

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Penilai Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025. Tahun 2025 target nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 80.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan pada tahun 2024 dengan target 75.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran Penataan Kearsipan dan Persuratan sebesar Rp 294.454.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp 168.947.000,- (Seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran ini setara dengan 57,00% terhadap total alokasi anggaran.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Triwulan I antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan non arsip lingkup Ditjen PDSPKP di Cikarang, Jawa Barat tanggal 24 Januari 2025.



Gambar 20. pemusnahan non arsip lingkup Ditjen PDSPKP

2. Pelaksanaan sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tanggal 30 Januari 2025



Gambar 21. sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

3. Pelaksaaan kegiatan verifikasi penyerahan arsip statis sistem logistik ikan nasional pada tanggal 18 Februari 2025 di Jakarta.



Gambar 22. Verifikasi Penyerahan Arsip Statis Sistem Logistik Ikan Nasional

4. Penilaian usul musnah arsip di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 6 Maret 2025.



Gambar 23. Penilaian usul musnah arsip di lingkungan Ditjen PDSPKP

5. Pelaksanaan Dashboard Kinerja Kearsipan pada tanggal 20 Maret 2025.



Gambar 24. Dashboard Kinerja Kearsipan

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp448.144.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp167.417.000,- atau setara dengan 37%.

12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ

di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 9 dan 10 Januari 2025. Kegiatan

bertujuan untuk melakukan finalisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi SiRUP, finalisasi pencatatan non tender dan swakelola di LPSE (AMEL) Tahun Anggaran 2024, dan penyelesaian status paket E-Purchasing Tahun 2024;

- b. Pelaksanaan rapat Penginputan RUP Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 22 s/d 24 Januari 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025 pada Aplikasi SiRUP;
- c. Pelaksanaan rapat finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 13 Maret 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan finalisasi Updating Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pasca efisiensi pada Aplikasi SiRUP;



Gambar 25. Rapat finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP

13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0; Probis Level 1; Probis Level 2; Probis Level 3. SProbis Level 0 dan Level 1 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 65. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pembahasan Usulan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PDSPKP pada tanggal 7 Januari 2025;
- b. Mengikuti Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 Januari 2025;
- c. Mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tanggal 23 Januari 2025;
- d. Mengikuti Finalisasi Manual Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur pada tanggal 30 Januari 2025;
- e. Penyelarasan Uraian Tugas dan Fungsi Bidang SDM Aparatur dan Organisasi pada 3 Februari 2025;

- f. Penyusunan Proses Bisnis Level 1 dan 2 serta Uraian Fungsi Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PDPSKP pada tanggal 13 – 15, 17 - 18 Februari 2025;
- g. Mengikuti Rapat Perubahan Organisasi (Analisis Beban Kerja dan Formasi) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Februari 2025;
- h. Mengikuti Rapat Penjabaran dan Penentuan Tugas Subbagian Tata Usaha, Pembagian Tugas Tim Kerja dengan Bagian Umum serta Evaluasi Pelaksanaan Mekanisme Kerja pada tanggal 19 Februari 2025;
- i. Mengikuti Pembahasan evaluasi jabatan struktural di lingkungan KKP dan menyepakati evaluasi jabatan untuk Kabag Umum dan Kasubbag Tata Usaha pada tanggal 26 Februari 2025;
- j. Rapat finalisasi penyusunan proses bisnis dan uraian fungsi unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 6 Maret 2025;
- k. Rapat penyempurnaan finalisasi penyusunan proses bisnis dan uraian fungsi unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 Maret 2025;
- l. Rapat penyusunan proses bisnis level 2 dan 3 Ditjen PDSPKP pada tanggal 24 Maret 2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp540.891.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp29.099.000,- atau setara dengan 5%.

14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi

yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran, Kriteria inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan. Klasifikasi inovasi mencakup: Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Aspek Penilaian Kelompok Umum yaitu: Ringkasan (0%), Latar Belakang dan Tujuan (10%), Kebaruan/Nilai Tambah (15%), Implementasi Inovasi (5%), Signifikansi (30%), Adaptabilitas (20%), Sumber Daya (5%), Strategi Keberlanjutan (15%), sedangkan Aspek Penilaian Kelompok Khusus yaitu: Ringkasan (0%), Deskripsi Awal Inovasi (5%), Pembaruan/Peningkatan Inovasi (15%), Dampak (30%), Adaptabilitas (20%), Penguatan Sumber Daya (10%), dan Strategi Penguatan Keberlanjutan (20%). Tema KIPP 2025 yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Penilaian proposal inovasi dilakukan melalui aplikasi SINOVIK.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 77. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77. Kegiatan penilaian inovasi rencananya dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025 sehingga saat ini belum ada realisasi. Pada tahun 2024, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 76. Capaian pada indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah 85,26 setara dengan 112,18% dari target.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini dengan melakukan pembahasan IKU terkait Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 31 Januari 2025.



Gambar 26. Rapat pembahasan IKU terkait Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp222.880.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp18.072.000,- atau setara dengan 8%.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 90. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya.

Direktorat Jenderal PDSPKP menargetkan tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup pada tahun 2025 sebesar 91 yang dihitung pada

Triwulan IV. Pada tahun 2024 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 91. Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 96 atau sebesar 109,89% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat pembahasan kerangka sampling Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2025, 20 Januari 2025;
- b. Rapat pendataan Informasi Geospasial Tematik Bidang PDSPKP, 24 Januari 2025;
- c. Rapat kordinasi Informasi Geospasial Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP, 5 Februari 2025; dan
- d. Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran, 24 Februari 2025.



Gambar 27. Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.777.120.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp67.764.000,- atau setara dengan 4%.

16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

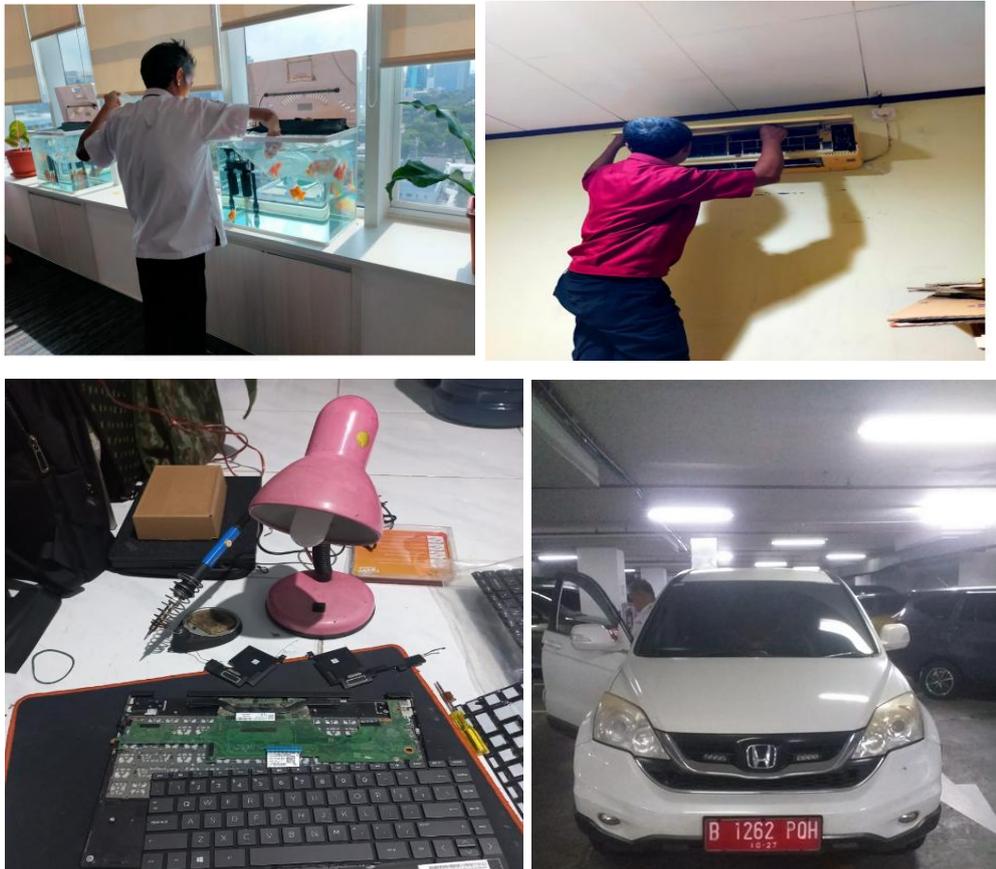
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	3	3	3	12	3	3	3	3	100,00	25	0,00	0

Capaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 3 layanan. Jumlah ini telah memenuhi 100% dari target Triwulan I Tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 3 layanan, serta mencakup 25% dari target tahunan yang berjumlah 12 layanan. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2024 yang juga sebesar 3 layanan, maka tidak terdapat pertumbuhan capaian karena realisasi tetap konsisten pada angka yang sama (terdapat perbedaan satuan yang digunakan, yaitu tahun 2024 menggunakan satuan bulan, sedangkan tahun 2025 menggunakan satuan layanan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis perbandingan antar tahun).

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini di Triwulan I antara lain:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Satker Pusat;
2. Layanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan;
3. Pembayaran gaji PPNPN Satker Pusat;

4. Pembayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satker Pusat;
5. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat diantaranya:
 - melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2;
 - melakukan pemeliharaan alat pengolah data berupa laptop, printer, infocus
 - melakukan pemeliharaan barang elektronik berupa Ac Cassete, AC Split, kulkas, dispenser;
 - melakukan pemeliharaan inventaris kantor berupa meja , kursi kerja, kursi rapat, pintu dan lainnya



Gambar 28. Pemeliharaan BMN

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp73.400.629.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp16.199.539.000,- atau setara dengan 18%.s

17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 21. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 100%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakasssn tahunan dimana penilaian

dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 100%.

Pada tahun 2025 target persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100%. Penghitungan capaian Indikator ini dilakukan secara tahunan, sehingga capaiannya dapat diukur pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan maupun dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dan dengan capaian pada periode yang sama.

Beberapa pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan I di antaranya:

1. Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (*Coolbox*) Tahun Anggaran 2024
 - a. Pada tanggal 26 februari 2025 terdapat permintaan dokumen pengadaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (*Coolbox*) Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/1331/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus;
 - b. 12 Maret 2025 Ditjen PDS telah mengirim dokumen yang diminta oleh pihak Polda;
 - c. 10 April 2025 Polda Metro Jaya kembali bersurat undangan wawancara dan permintaan dokumen nomor B/2070/IV/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
 - d. Dijadwalkan pada tanggal 28 April 2025, Direktur Pemasaran akan menghadiri undangan Polda Metro Jaya
2. Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel Tahun Anggaran 2024
 - a. Pada tanggal 11 februari 2025 terdapat permintaan dokumen pengadaan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/534/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
 - b. 14 Februari 2025 Ditjen PDS telah mengirim dokumen yang diminta oleh pihak Polda

- c. 13 April 2025 Polda Metro Jaya kembali bersurat undangan wawancara dan permintaan dokumen nomor B/2070/IV/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
 - d. Pada tanggal 13 Maret 2025 Tim Teknis mewakili PPK hadir untuk memberikan keterangan di Polda Metro Jaya
3. Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun Anggaran 2024
- a. Pada tanggal 26 februari 2025 terdapat permintaan dokumen pengadaan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/1331/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
 - b. 12 Maret 2025 Ditjen PDS telah mengirim dokumen yang diminta oleh pihak Polda
 - c. Pada tanggal 10 April 2025 Polda Metro Jaya kembali bersurat undangan wawancara dan permintaan dokumen nomor B/2071/IV/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus
 - d. Dijadwalkan pada tanggal 23 April 2025 Direktur Pengolahan pada periode pengadaan berlangsung, Bapak Widya Rusyanto akan menghadiri undangan Polda Metro Jaya
4. Pasar Ikan Higienis Pejompongan
- a. Tanggal 24 Februari 2025 Sesditjen PDSPKP yang diwakili oleh Tim Hukum dan Tim BMN menghadiri pemanggilan oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan Laporan PD Sarana Jaya kepada PT. Putra Kirana Sentosa
 - b. Pada tanggal 3 Maret 2025 dilakukan upaya komunikasi dengan PT. Putra Kirana Sentosa terhadap pemanggilan oleh Polda terkait dengan PIH Pejompongan
 - c. Inti dari pembahasan tersebut adalah: laporan pengaduan PD. Sarana Jaya dan jaminan keberlanjutan Pengelolaan PIH
 - d. 17 Maret 2025 dilakukan mediasi tiga pihak yang di inisiasi oleh Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh PT PKS, dan PD Sarana Jaya

- e. Pada tanggal 18 Maret 2025 dilakukan mediasi yang di inisiasi oleh Polda Metro Jaya, yang pada intinya disampaikan bahwa PIH Pejompongan masih dalam proses penyerahan hibah dari BMN menjadi BMD kepada Pemda DKI, apabila belum selesai proses hibah, maka status PIH Pejompongan masih sebagai BMN yang dimiliki oleh KKP up Ditjen PDSPKP, sehingga Ditjen PDS masih memiliki kewenangan untuk menunjuk pengelola pada masa transisi sebelum hibah berpindah kepada Pemda DKI.

5. Piutang PT Perindo

- a. Hasil pembahasan Ditjen PDS dengan BPK dan PT PERINDO pada tanggal 12 Februari 2025 berkaitan dengan piutang PT PERINDO yang diperlukan adanya telaah hukum
- b. Tim Kerja Hukum Ditjen PDSPKP telah melakukan telaah hukum dan telah bermohon telaah kepada Biro Hukum berkaitan dengan substansi

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp210.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp3.172.000,- atau setara dengan 2%.

18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)

Sesuai dengan Permen KP No. 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. Ada beberapa jenis kerja sama

yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah persentase dokumen kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP. Dokumen yang diterima oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya sedangkan Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan pada tahun 2024 dengan target 80%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja indikator Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp315.532.000,-. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp 22.742.700,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus rupiah). Realisasi anggaran ini setara dengan 7,21% terhadap total alokasi anggaran.

Selama bulan Januari-Maret 2025, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
- Rapat Persiapan Kegiatan US Embassy MMAF Fisheries Investment Through Select USA tanggal 7 Januari 2025;
 - Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi Ministry of Climate Change and Environment (MOCCA) Persatuan Emirat Arab ke Indonesia tanggal 9 Januari 2025;
 - Rapat Evaluasi MoU on Marine and Fisheries RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 20 Januari 2025;
 - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Memorandum of Understanding Marine and Fisheries Cooperation RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 24 Januari 2025;
 - Rapat Pembahasan Draft PoA Implementasi MoU on Fisheries and Aquaculture RI-Mesir tanggal 3 Februari 2025;
 - Rapat Interkem Pembahasan Counterdraft MoU on Fisheries and Aquaculture RI-Turki tanggal 6 Februari 2025;
 - Pelaksanaan Steering Committee Meeting tanggal 6 Februari 2025;
 - Rapat Finalisasi MoU on Fisheries and Aquaculture Indonesia-Turki tanggal 7 Februari 2025;
 - Rapat Finalisasi Deliverables Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia tanggal 10 Februari 2025;
 - Rapat Pembahasan Draft Strategic Plan for Ensuring Food Security in OIC Member tanggal 13 Februari 2025;
 - Rapat Pembahasan Usulan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Official Development Assistance (ODA) Korea tanggal 26 Februari 2025;
 - Rapat pembahasan Brazil, Russia, India, and China (BRICS) *Intergovernmental Organization* tanggal 11 Maret 2025;
 - Rapat Pembahasan Project Global Mariculture Value Chain dengan FAO tanggal 14 Maret 2025;
 - Rapat Perkembangan Perjanjian Subsidi Perikanan tanggal 18 Maret 2025;

- Rapat Pembahasan Counterdraft MoU on Fisheries and Aquaculture RI-Hongaria tanggal 20 Maret 2025.
- b. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;
- Pembahasan rencana implementasi SRG dan rencana perpanjangan kerja sama;
 - Pembahasan implementasi SRG dalam rangka antisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA;
 - Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta tanggal 21 Januari 2025;
 - Sosialisasi Gemarikan pada peringatan HUT PERWARI tanggal 20 Maret 2025 di Jakarta;
 - Fasilitasi Bazar produk perikanan pada peringatan HUT PERWARI tanggal 20-21 Maret 2025.
 - Pertukaran data realisasi kredit UMi sektor KP dari PT PNM. Data diberikan secara berkala setiap bulan. sampai dengan TW I realisasi kredit UMKM ultra mikro sebesar Rp. 253.440.000.000 (dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp898.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp111.725.000,- atau setara dengan 14%.

19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Kementerian / Lembaga wajib menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa

yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	120,00	120,00	120,00	-

Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 0%. Capaian ini menunjukkan tidak adanya pemberitaan negatif pada periode tersebut, jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu ≤5%, baik untuk target Triwulan I Tahun 2025 maupun target tahunan. Dengan hasil ini, capaian terhadap target mencapai 120%(terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku), yang berarti target berhasil terlampaui secara signifikan. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2024 yang juga mencatat realisasi sebesar 0%, maka tidak terjadi pertumbuhan karena capaian telah berada pada angka maksimal, yaitu nol pemberitaan negatif.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp194.971.000,- (Seratus Sembilan Puluh

Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sampai akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp113.671.325,- (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah.) atau setara dengan 58,30% terhadap total alokasi anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Membuat siaran pers setiap event Ditjen PDSPKP sehingga media massa tidak ada kesalahpahaman dalam menyusun berita;
- 2) Menjalin media *relationship* yang baik dengan media massa melalui pelayanan informasi dan publikasi yang informatif untuk kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP;
- 3) Menayangkan berbagai konten informasi dan edukasi tentang Ditjen PDSPKP melalui akun resmi media sosial dan website Ditjen PDSPKP;
- 4) Menayangkan berita tentang kegiatan Ditjen PDSPKP secara rutin dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan penyampaian berita baik pada media sosial maupun website Ditjen PDSPKP;
- 5) Memelihara *engagement* dengan *follower* pada media sosial Ditjen PDSPKP dengan tetap memperhatikan materi konten yang tepat;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pertemuan pembahasan kegiatan/event.

Tabel 24. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
Januari	53		3	56
Februari	49		3	52
Maret	50		4	54
Total	152		10	162

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.559.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp113.671.000,- atau setara dengan 7%.

20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 (12,5%).
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (25%).
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 (25%)
- Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 80%.

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,00%. Capaian indikator kinerja

pada tahun 2025 merupakan target tahunan yang pencapaiannya diperoleh di akhir tahun.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar Rp 135.590.000,- (seratus tiga puluh lima juta) dari pagu awal yang telah diblokir oleh Kementerian Keuangan sebesar 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp93,747,138- (sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) atau setara dengan 69,14%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pada tanggal 13 Januari 2025, diselenggarakan rapat penilaian BMN berupa Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru oleh tim penilai Kementerian Keuangan RI c.q. KPKNL Jakarta II. Rapat dihadiri oleh tim penilai KPKNL Jakarta II, perwakilan Direktorat Pemasaran, dan tim kerja pengelolaan BMN dan PBJ – Setditjen PDSPKP
- b. Pada tanggal 24 Januari 2025, Tim Kerja BMN dan PBJ mengadakan rapat pembahasan penyelesaian piutang PT Perikanan Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) – Kementerian Keuangan RI di Ruang Rapat Discuss, Raiser Ikan Hias Cibinong. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ dan dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan dan BMN – Setjen KKP, perwakilan Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSPKP, Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal – Setditjen PDSPKP, dan tim kerja hukum – Setditjen PDSPKP;
- c. Pada tanggal 30 Januari 2025, Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengirimkan surat Nomor S-54/MK.6/2025 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Surat Persetujuan Hibah Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Barang Milik Negara tersebut berupa 1 unit Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen dengan nilai perolehan sebesar

- Rp16.680.116.000 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam belas ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 14 Februari 2025, Timja BMN dan PBJ – Setditjen PDSPKP mengadakan pertemuan terkait dengan pembahasan skema pemanfaatan BMN berupa Cold Storage 2000 ton dan 1000 ton, serta pembangunan cold storage melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS). Rapat dihadiri oleh Kepala KPKNL Jakarta II – Kementerian Keuangan RI, Biro Keuangan dan BMN KKP, Biro Umum dan PBJ KKP, Kepala BBP3KP, dan Tim Satgas Pengelolaan Kawasan Cold Storage Muara Baru;
 - e. Pada tanggal 19 Februari 2025, Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP menyampaikan Nota Dinas Nomor 808/DJPDSPKP.1/PL.720/II/2025 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN perihal Permohonan Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Surat ini bertujuan untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II Nomor S-169/MK.6/KNL.0702/2025, tanggal 18 Februari 2025 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Berpendingin pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Pada tanggal 21 Februari 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP selaku Kuasa Pengguna Barang Setditjen PDSPKP telah menandatangani Kronologis Koreksi Kode Barang (Reklasifikasi) BMN berupa Bangunan Gedung Permanen PIM Muara Baru dan Surat Keterangan Reklasifikasi Kode Barang Nomor B.2365/DJPDSPKP.1/PL.760/II/2025;
 - g. Pada tanggal 4 Maret 2025, Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ menghadiri rapat pembahasan Rencana Pemanfaatan Space Lantai 2 Gedung Pasar Ikan Modern Muara Baru untuk Resto Modern yang diselenggarakan melalui Video Konferensi Zoom. Rapat dihadiri oleh perwakilan KPKNL Jakarta II, Direktorat Pemasaran, dan Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ – Setditjen PDSPKP;
 - h. Pada tanggal 13 Maret 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP mengirimkan Nota Dinas Nomor 1108/DJPDSPKP.1/PL.720/III/2025 perihal

Permohonan Reviu Sewa Gedung Perkantoran PIM Muara Baru. Permohonan reviu ini menindaklanjuti permohonan sewa dari Koperasi Arto Ulam Makmur, PT Smirna Intan Utama, dan CV Solutee Semangat Internasional untuk pemanfaatan ruangan indoor lantai 2 Pasar Ikan Modern Muara Baru.

- i. Pada tanggal 14 Maret 2025, Sekretaris Ditjen DPSPKP mengirimkan surat Nomor B.3183/DJPDSPKP.1/PL.750/III/2025 kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dengan Tembusan kepada Direktur Jenderal PDSPKP, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, dan PD Pembangunan Sarana Jaya perihal Berita Acara Serah Terima Hibah PIH Pejompongan. Tujuan dari surat ini adalah menyampaikan dan untuk mendapatkan masukan dan koreksi bersama perihal *draft* Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah dan Naskah Perjajian Hibah PIH Pejompongan.



Gambar 29. Rapat Pembahasan Pemanfaatan BMN *Cold Storage* Muara Baru bersama KPKNL Jkt II, Pengguna Barang KKP dan BBP3KP



Gambar 30. Rapat Pembahasan Piutang PT Perindo atas Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru Bersama Biro Keuangan dan Inspektorat IV KKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.251.000.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp93.747.000,- atau setara dengan 7%.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 89.082.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp 19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp 70.025.925.000,- (Tujuh puluh miliar dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 21.872.044.000,-(Dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah) setara dengan 24,55% terhadap pagu awal dan sebesar 31,23% dari pagu anggaran efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 telah menyajikan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang baik dengan ditunjukkan nilai Nilai Kinerja Organisasi yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 107.50% (Kategori Baik).

Namun demikian upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rancangan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Ditjen PDSPKP.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan I tahun 2025, seluruh indikator kinerja kegiatan yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan telah mencapai target.

C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Tabel 26. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi terkait pengisian target/ capaian output /pelaksanaan kegiatan/ anggaran • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pelaksanaan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan monitoring capaian IKPA pada pengisian Capaian Output periode Triwulan IV tahun 2024 dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Ditjen PDPSKP pada tanggal 8 Januari 2025, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 38 Satker TP b. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2025 berdasarkan pada akun 51, 52 dan 53 pada Satker Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan, guna menghindari terjadinya deviasi pada Halaman III DIPA tidak melebihi (kurang/lebih) sebesar 5 % (lima persen). Pemutakhiran data RPD pada triwulan I Tahun 2025 sebagai satu langkah DJPDSPKP dalam menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Februari 2025 perihal Penyesuaian Data dan Penghitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I tahun 2025, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indicator kinerja pada IKPA. c. Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA pada Indikator Halaman III DIPA Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 24 Februari 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAM www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Machmud**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PenguATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87
		10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<i>PROGRAM : Dukungan Manajemen</i>	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	127.809.094
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	127.809.094

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Machmud